

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang fenomenal di Indonesia. Dalam Wikipedia Indonesia, kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. (sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>, diakses pada 18, Januari 2014). Untuk melihat data kemiskinan di Indonesia, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

TABEL 1.1  
TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA

No	Periode	Jumlah/orang	Persentase
1	Maret 2013	28,07 juta	11,37%
2	September 2012	28,59 juta	11,66%
3	Maret 2012	29,13 juta	11,96%
4	September 2011	29,89 juta	12,36%
5	Maret 2011	30,02 juta	12,49%
6	Maret 2010	31,02 juta	13,33%
7	Maret 2009	32,53 juta	14,15%
8	Maret 2008	34,96 juta	15,42%
9	Maret 2007	37,17 juta	16,58%
10	Maret 2006	39,30 juta	17,75%
11	Februari 2005	35,10 juta	15,97%
12	Februari 2005	36,10 juta	16,66%

(sumber: BPS 2013)

Pada bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,07 juta orang (11,37 persen), berkurang sebesar 0,52 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,66 persen). Selama periode September 2012-Maret 2013, jumlah

penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang 0,18 juta orang (dari 10,51 juta orang pada September 2012 menjadi 10,33 juta orang pada Maret 2013), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,35 juta orang (dari 18,09 juta orang pada September 2012 menjadi 17,74 juta orang pada Maret 2013). Selama periode September 2012-Maret 2013, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tercatat mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2012 sebesar 8,60 persen, turun menjadi 8,39 persen pada Maret 2013. Sementara penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 14,70 persen pada September 2012 menjadi 14,32 persen pada Maret 2013. (<http://www.bps.go.id/?news=1023>, diakses pada tanggal 15, September 2013). Untuk melihat lebih lanjut angka kemiskinan berdasarkan provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

TABEL 1.2  
TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI DI INDONESIA

Provinsi	Jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan (%)
Aceh	876.600	18.58
Sumatera Utara	1,378.400	10.41
Sumatera Barat	397.900	8.00
Kepulauan Riau	131.200	6.83
DKI Jakarta	366.800	3.70
<b>Jawa Barat</b>	<b>4.421.500</b>	<b>9.89</b>
Jawa Tengah	4.863.400	14.98
DI Yogyakarta	562.100	15.88
Jawa Timur	4.960.500	13.08
Banten	648.300	5.71
Bali	161.000	3.95
Nusa Tenggara Barat	828.300	18.02
Nusa Tenggara Timur	1.000.300	20.41
Kalimantan Barat	355.700	7.96
Kalimantan Tengah	141.900	6.19
Kalimantan selatan	189.200	5.01
Kalimantan Timur	246.100	6.38
Sulawesi Utara	177.500	7.64
Sulawesi Tengah	409.600	14.94
Sulawesi Selatan	805.900	9.82
Sulawesi Tenggara	304.300	13.06
Gorontalo	187.700	17.22
Sulawesi Barat	160.600	13.01

Maluku	338.900	20.76
Maluku Utara	88.300	8.06
Papua Barat	223.200	27.04
Papua	976.400	30.66
<b>Indonesia</b>	<b>28.594.600</b>	<b>11.66</b>

(sumber : BPS, 2012)

Menurut tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia beragam, Jawa Barat walaupun tidak berada pada provinsi yang paling miskin tetapi didapati menjadi provinsi ketiga termiskin berdasarkan jumlah penduduk setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah sebesar 4.421.500 jiwa pada tahun 2012. Oleh karena itu masih banyak penduduk miskin di Jawa Barat yang perlu diturunkan angka kemiskinan melalui pembangunan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Jawa Barat, dan pada umumnya di Indonesia.

Mengakhiri kemiskinan merupakan sebuah ideology pembangunan, Fathur Anas, seorang peneliti di Developing Countries Studies Center (DCSC) dalam situs di internet (<http://suar.okezone.com/read/2013/04/04/58/786060/large>, yang diakses pada 18, Januari 2014) mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi agenda besar pembangunan global dewasa ini. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Untuk mengurangi kemiskinan tersebut diperlukan berbagai langkah strategis. Indonesia pun terus membangun untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah sampai saat ini terus berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan. Banyak program-program yang dijalankan untuk mendukung proses pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan di Indonesia ini. Tentu untuk mencapai kesejahteraan dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Jika kita perhatikan data kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun secara persentase mengalami penurunan. Saat ini Indonesia berada dalam posisi lebih baik dalam pengentasan kemiskinan. Jika saat *Millenium Development Goals* disusun pada tahun 2000 tingkat kemiskinan di Indonesia berada di level 19,14 persen, maka saat ini tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 11,37 persen (BPS, 2013). Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah boleh dikatakan cukup berhasil. Penurunan angka kemiskinan di Indonesia dapat

terjadi karena Indonesia cukup berhasil melakukan terobosan berarti dalam pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan, Untuk itu, sejak tahun 2007 dilakukan langkah-langkah pengurangan kemiskinan secara terpadu dengan tiga jenis paket. Paket pertama disebut dengan bantuan dan perlindungan sosial. Paket kedua adalah memberdayakan kecamatan dan desa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Paket ketiga adalah pemberian kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha kecil dan menengah. Dengan dicanangkannya PNPM Mandiri sebagai upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan, maka perlu kita dalami bagaimana peran PNPM dalam menurunkan angka kemiskinan.

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan Indonesia, pada tahun 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program pemerintah yang bernama PNPM Mandiri guna menurunkan angka kemiskinan, dalam PTO (petunjuk teknis operasional) pada halaman 1 dalam sub bab latarbelakang, disebutkan bahwa Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK). (PTO PNPM Mandiri)

Sasaran dari program PNPM Mandiri ini ialah kecamatan-kecamatan yang dinilai paling miskin, dan Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung merupakan salah satu desa yang masuk dalam kategori tersebut. Ada berbagai macam mata pencaharian di Desa Lebakwangi, mulai dari petani, buruh industry, hingga pedagang. Pada tahun 2008, PNPM Mandiri telah diselenggarakan di Desa Lebakwangi dengan tujuan-tujuan yang sesuai dengan PTO PNPM Mandiri yakni, meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel,

meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*), meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local, meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dengan seiring berjalannya PNPM Mandiri sejak 2007, pada 18 Juni 2013, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 bertema “Penguatan kelembagaan untuk keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian”. Dalam rakernas tersebut, Menko Kesra HR. Agung Laksono mengatakan bahwa berdasarkan evaluasi, setelah tujuh tahun program berjalan, kita dapat melihat adanya kontribusi signifikan dari program-program pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan secara nasional. Secara khusus melalui PNPM Mandiri Perdesaan sampai saat ini, telah terkumpul aset abadi senilai 8,4 triliun rupiah yang terus akan bergulir menjadi modal pemberdayaan bagi 683.789 kelompok masyarakat. Disamping itu, masyarakat juga telah mampu melaksanakan kegiatan secara swakelola guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat miskin di perdesaan. Demikian antara lain dikatakan Menko Kesra Dalam Rakernas tersebut yang didampingi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Lebih lanjut Menko Kesra mengatakan PNPM Mandiri Perdesaan telah memberikan hasil-hasil yang positif, terutama berupa keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat, terselenggaranya integrasi perencanaan pembangunan, pengorganisasian masyarakat dalam mengelola kegiatan secara swakelola, serta proses demokratisasi dalam pengambilan

keputusan secara mandiri oleh masyarakat. Semua capaian positif PNPM Mandiri, membuat kita semua semakin yakin bahwa program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan perlu untuk tetap dilanjutkan. Kewajiban Pemerintah bersama Pemerintah Daerah adalah selalu mendampingi dan meyakinkan masyarakat bahwa kemandirian masyarakat perdesaanlah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan mengangkat kehidupan bersama di perdesaan. Saat ini PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan di 5.146 kecamatan, 392 kabupaten pada 32 provinsi yang meliputi hampir 65.490 desa/kelurahan di Indonesia (sumber : <http://www.menkokesra.go.id/content/menko-kesra-pnpm-mandiri-memberikan-kontribusi-penurunan-kemiskinan>, diakses pada tanggal 18, Januari 2014)

Salah satu program dari PNPM Mandiri ialah SPP. SPP merupakan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan. Berdasarkan PTO PNPM Mandiri SPP ini merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam, yang bertujuan mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan social dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan RTM.

Program SPP ini di awasi oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di tingkat kecamatan, dan di kelola oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) di tingkat Desa, SPP sendiri telah diselenggarakan di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sejak tahun 2008, menurut kepala desa Lebakwangi, program SPP memberi dampak positif bagi masyarakat desa Lebakwangi yang di dominasi oleh rumah tangga miskin khususnya bagi ibu rumah tangga non produktif. ditambah SPP merupakan sebuah bidang program yang mendapatkan antusias tertinggi pada saat musyawarah desa (musdes) diselenggarakan pada tahun 2008 di Desa Lebakwangi, oleh karenanya musdes tersebut sepakat untuk menyelenggarakan program SPP di Desa Lebakwangi kecamatan Arjasari, namun dengan seiring berjalannya program SPP tentu tidak selalu berjalan lancar, masih ada kendala-kendala dalam program SPP, salah satunya adalah masih adanya

peserta yang menggunakan dana SPP untuk keperluan pribadi, tentu hal ini tidak sejalan dengan pencapaian tujuan SPP.

TPK PNPM Mandiri merupakan suatu tim pengelola kegiatan yang memerlukan pengelolaan terpadu, baik oleh KPMD sebagai pelaksana kegiatan program maupun oleh ketua TPK sebagai pengendali kegiatan di TPK. Koordinasi yang baik oleh ketua TPK melahirkan pencapaian tujuan SPP, serta tujuan dari para individu yang ada di lingkungan Desa Lebakwangi. Disamping itu, keterpaduan kerja KPMD dalam melaksanakan kegiatan program SPP serta penciptaan situasi yang kondusif merupakan prasyarat keberhasilan tujuan diselenggarakannya SPP di Desa Lebakwangi. Dengan demikian, KPMD memegang peranan penting, baik dalam mengelola kegiatan SPP maupun dalam mengelola administrasi yang dapat menunjang keberhasilan tujuan PNPM sesuai PTO PNPM Mandiri pada halaman 11 yang membahas pelaku di tingkat desa.

Dari uraian di atas, dalam rangka ikut berpartisipasi mengembangkan PNPM Mandiri dalam program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dalam pemberdayaan masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Pemberdayaan masyarakat melalui program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti mengidentifikasi permasalahan tersebut yaitu :

1. Masih banyaknya rumah tangga miskin di Desa Lebakwangi
2. Sebagian besar perempuan di Desa Lebakwangi merupakan ibu rumah tangga non produktif
3. Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) memberi peluang bagi masyarakat, khususnya masyarakat perempuan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga.
4. Program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan program yang mendapatkan antusias tertinggi dari pada program fisik



PNPM pada saat musyawarah desa (musdes) diselenggarakan pada tahun 2008 di Desa Lebakwangi.

5. Masih adanya peserta simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) yang menggunakan dana program untuk kebutuhan pribadi, sehingga bertentangan dengan pencapaian tujuan SPP diselenggarakan

### C. Perumusan Masalah

Dari hasil identifikasi yang telah dipaparkan di atas maka penulis membatasi mengenai penelitian yaitu program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut :  
*“Bagaimana peran program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung?”*

Bedasarkan permasalahan di atas maka dapat dimunculkan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa Lebakwangi
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Lebakwangi
3. Bagaimanakah dampak pelaksanaan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Lebakwangi

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program SPP di Desa Lebakwangi.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan data tentang proses program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Lebakwangi
2. Mendeskripsikan data mengenai faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) di Desa Lebakwangi
3. Mendeskripsikan data mengenai dampak pelaksanaan program simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Lebakwangi

## **E. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Pendidikan Luar Sekolah khususnya Pemberdayaan Masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan ilmu Pendidikan Luar Sekolah khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagi pihak-pihak lain, semoga hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mempelajari mengenai sistem yang ada pada PNPM Mandiri, guna memberdayakan masyarakat

## **F. TINJAUAN TEORITIS**

Yang menjadi tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah sebuah upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan mempengaruhi kehidupan komunitas mereka (Ife, 1995:182)
2. PNPM mandiri merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal (PTO PNPM Mandiri)

3. SPP atau simpan pinjam untuk kelompok perempuan adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman (PTO PNPM Mandiri)

## **G. METODELOGI PENELITIAN**

Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi, pengertian dari masing-masing teknik tersebut ialah sebagai berikut :

### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan serta pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013:72).

### **b. Observasi**

Observasi adalah kegiatan mempelajari suatu gejala dan peristiwa melalui upaya melihat dan mencatat data atau informasi secara sistematis (Sudjana, 2004:238).

### **c. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir,1988: 111).

### **d. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, Arikunto. 1999:207).

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : Pendahuluan, didalamnya membahas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Asumsi Dasar, Hipotesis, Penjelasan Istilah, Metodologi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II : Kajian Pustaka yang didalamnya membahas beberapa Teori dan Konsep.
- BAB III : Prosedur Penelitian, berisi tentang uraian Metode Penelitian, Subjek Penelitian Teknik Pengumpulan Data, Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.
- BAB IV : Deskripsi analisis data hasil penelitian tentang hasil penelitian pengaruh kepemimpinan situasional terhadap program SPP di Desa Lebakwangi.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran



Romy Novan Fauzi, 2014

*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP)*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)